

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA (PMB-RW) DI
KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU**

Oleh :

Tisa Juniazti

Email : Tisajuniazti@gmail.com

Pembimbing : **DR. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Society Empowerment Program based Hamlet (PMB-RW) was one of construction program provided by government of Pekanbaru city. This program purposed to empower all society started from a Hamlet (RW). The implementation of this program had needed participation from society in order to achieve a program purpose. The participation of this program was men and women. In 2015, this program can reach socialization stage in form was training. The training had done needs a woman as the main participation. The main participation in the training was woman.

This function of this research was to determine woman's participation in PMB-RW program. The woman's participation were training and the influence factors of woman's participation in Tuah Karya district. The training was include a sewed training, a cooking training and tambourine.

The concept theory used by researcher was a participation theory created by Sutoro Eko, society empowerment, decentralization and gender. This research was qualitative and descriptive research that had purposes to give a systematical and factual description about woman participation in program implementation. The collection of data in this research was using an interview, an observation and documentation.

The result of this research showed that a woman had participate in PMB-RW program especially in training implementation of Tuah Karya district. Some factors that influence the participation were from intern factors such as; the willingness/awareness and occupation. Besides, from extern factor are the leadership and facility factor.

Key words: woman's participation, society empowerment.

PENDAHULUAN

Pembangunan partisipatif adalah suatu pembangunan yang memungkinan menumbuhkan kreatifitas dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan di suatu kawasan atau lingkungannya. Partisipasi masyarakat akan mengarahkan kepada tumbuhnya kemampuan-kemampuan masyarakat untuk mandiri. Partisipasi tidak hanya terbatas dalam pengertian "ikut serta" secara fisik, melainkan keterlibatan yang memungkinkan melaksanakan identifikasi masalah sendiri, mengorganisasikan masalah, mencari akar masalah dan menentukan perencanaan program pembangunan.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat melalui Instansi-instansi vertikal di daerah, maupun Pemerintah itu sendiri. Salah satu program Pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-Pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan metode partisipatif tepat digunakan dalam pembangunan karena dengan menggunakan metode partisipatif maka rakyat dapat berperan secara aktif dalam proses pembangunan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian diakomodasi oleh pemerintah. Namun, partisipasi tidak mudah dilakukan oleh masyarakat karena berbagai hambatan karena

kurangnya kemampuan dan kekuasaan masyarakat. Pemberian kekuasaan saja tidak ada artinya tanpa diikuti peningkatan kapasitas untuk melakukannya.

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan pemberdayaan, pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan. Tiga bentuk prinsip dan struktur mereka yang dirugikan yaitu kelas, ras dan gender. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan-perbedaan. Partisipasi seharusnya dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi hak antara laki-laki dan perempuan.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan secara tegas bahwa, setiap warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak. Dalam konteks pembahasan ini bisa diartikan bahwa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam mensukseskan program-program pembangunan. Namun kenyataannya, posisi dan peran perempuan dalam pembangunan masih termarginalkan. Implikasinya, walaupun dari segi kuantitas jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, akan tetapi secara kualitas lebih kecil dari laki-laki.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional merupakan salah satu dari penjabaran ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun isinya adalah

instruksi kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan bersenjata, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, peningkatan kualitas hidup perempuan merupakan salah satu dari agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis. Bahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2006 dan 2007, pengarusutamaan gender telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan yang harus dilakukan setiap kegiatan pembangunan.

Perempuan sering dijadikan sebagai objek, bukan pelaku pembangunan. Padahal partisipasi perempuan dalam pembangunan hanya bisa diwujudkan jika perempuan diposisikan sebagai pelaku atau subjek dalam pembangunan. Pembangunan seharusnya menjadi alat (*tools*) dan bukannya menjadi tujuan (*ends*) dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar warga negara, laki-laki dan perempuan sehingga kesetaraan antara keduanya bisa terwujud.

Kota Pekanbaru merupakan Kota terbesar di Provinsi Riau yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki sumber informasi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan Pemerintahan maupun bagi masyarakat, sehingga sumber informasi yang berkembang adalah

bagian dari produk hukum maupun kearifan lokal yang ada di Kota Pekanbaru.

Selama ini banyak produk hukum dan kearifan lokal yang ada masih merupakan *Tacit Knowledge* (pengetahuan yang sulit untuk dibagikan kepada orang lain) bagi pimpinan atau lembaga tertentu yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga keinginan Walikota Pekanbaru yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak sampai kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah atau lembaga lain di Kota Pekanbaru harus mengambil langkah agar *Tacit Knowledge* tidak hanya difahami oleh pimpinan atau lembaga di level tertentu, maka Pemerintah memberi peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikutsertakan perannya di level Rukun Warga (RW) dari *Tacit Knowledge* menjadi *Explicit Knowledge* (pengetahuan yang dapat dijelaskan serta dapat dibagikan kepada orang lain) yang berperan sebagai media komunikasi pembangunan, artinya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Daerah (Perda) lainnya perlu diterjemahkan kedalam bentuk program melalui pendekatan Pemberdayaan bersama-sama masyarakat Kota Pekanbaru.

Salah satu strategi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam melaksanakan pembangunan yaitu dengan cara mengeluarkan program pembangunan. Salah satu program pembangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru adalah program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). Program

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Madani yang dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) memiliki beberapa Landasan Hukum, yaitu:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kota/Kabupaten.
4. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
5. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penetapan Hari Jadi Pekanbaru tanggal 26 Desember 2005 .
6. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

7. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan tanggal 22 Agustus 2006.
8. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Periode 2012-2017.
9. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2015 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

Pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dilaksanakan pertamakali di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2014.

” Kecamatan Tenayan Raya menjadi pilot project pelaksanaan PMB-RW yang dilaksanakan pada tahun 2014 dan disalurkan ke 93 RW. Sedangkan pada tahun 2015 ini akan dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan untuk Kecamatan yang belum menerima dana PMB-RW. Untuk pelatihan yang akan dilaksanakan melibatkan peran perempuan. Seperti pelatihan menjahit, tata boga, rebana dan untuk laki-laki dilaksanakan pelatihan perbengkelan motor”. Pelatihan ini dilakukan agar dapat melatih keterampilan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki yang belum mendapatkan perkerjaan dan dapat membantu

perekonomiam keluarga".
(Wawancara Dengan Kepala Seksi PMK Kecamatan Tampan 14 Desember 2015).

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan yang melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Tahun Anggaran 2015. Dengan jumlah penduduk tertinggi dari seluruh Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dan dengan jumlah penduduk perempuan tertinggi.

Ada 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Tampan yang melaksanakan Program tersebut, yaitu: Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, dan Kelurahan Delima.

Adapun program dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 yaitu berupa sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan merupakan program awal dari PMB-RW Kota Pekanbaru. Pelatihan dilaksanakan di setiap Kelurahan yang termasuk kedalam daftar Kelurahan yang melaksanakan program PMB-RW Tahun Anggaran 2015. Salah satu Kelurahan yang sudah melaksanakan yaitu Kelurahan Tuah Karya.

Pelatihan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Tuah Karya sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Pelatihan di Kelurahan Tuah Karya

No	Pelatihan	Peserta (Perwakilan RW)
1	Perbengkelan Motor	03 dan 12
2	Rebana	03, 09 dan 11
3	Tata Boga	12
4	Menjahit Lanjutan	09 dan 11

Sumber: Kelurahan Tuah Karya 2015

Dari tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa program pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) lebih melibatkan partisipasi perempuan daripada laki-laki. Pelatihan yang melibatkan partisipasi laki-laki yaitu pelatihan perbengkelan motor.

Dari fenomena di atas terlihat adanya progres keterlibatan perempuan dari program pelatihan yang dilaksanakan. Perempuan akan lebih berpartisipasi aktif dibandingkan laki-laki. Lebih banyak pelatihan yang melibatkan kaum perempuan. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru"**.

Konsep Teori

1. Konsep Desentralisasi

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dan tanggungjawab kepada aparatur dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di daerah untuk menangani masalah sosial dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal sesuai karakteristik sosial budaya

setempat dan pelaksanaannya memperhatikan demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas (Adisasmita 2011:185).

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Aziz,dkk (2005:136) merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses

3. Teori Partisipasi

Eko (2004:242) secara substantif, partisipasi mencakup tiga hal: Suara (*Voice*), Akses (*Access*), Kontrol.

Menurut Sutrisno dalam Eko (2003:105) partisipasi adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.

4. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG), atau dalam istilah Inggris *Gender Mainstreaming*, merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki yaitu, Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga ditemukan pola-pola yang jelas.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai representasi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Tampan

dan karakteristik penduduk yang heterogen baik dari tingkat pendidikannya, status ekonominya, dan jenis pencaharian penduduknya.

3. Informan Penelitian

Dalam menentukan informan ini penulis melakukan dengan cara menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu saja yang dianggap penting dan yang benar-benar memahami tentang program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

Adapun yang menjadi informan antara lain :

- Sub Bidang
Perekonomian Kota
BAPPEDA Pekanbaru
- Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(PMK) Kecamatan
Tampan
- Lurah Tuah Karya
- Sekretaris Lurah
- Perwakilan Masyarakat
- Ketua RW

Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi atau informan penelitian melalui wawancara mengenai Partisipasi Perempuan dalam Program PMB-RW di Kelurahan Tuah Karya.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita

butuhkan. Sumber data ini dapat diperoleh dari jurnal atau laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku, internet, koran dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun semua data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan jalan formal maupun non formal. Metode ini mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Digunakannya observasi karena untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena dan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang yang dapat dilakukan peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut **Sugiyono (2009:240)** merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, serta data-data mengenai pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.

c. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab kepada narasumber. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dengan maksud agar responden mengetahui maksud

dan materi yang dipertanyakan, untuk itu instrumen yang dipergunakan adalah berupa pedoman wawancara yang merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga dapat memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi responden untuk menyampaikan pendapatnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2015 merupakan dasar hukum pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang bertujuan “Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (RW)”.

Tahapan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) terdapat dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 yang meliputi :

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan merupakan tahapan awal dari suatu program. Pada tahapan persiapan inilah dibentuk tim Koordinasi tingkat kota sampai dengan tingkat Kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwako) No. 69 Tahun 2015 Program Pemberdayaan Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)

dikelola oleh SKPD Bappeda kota Pekanbaru dan beberapa Badan lainnya yang disebut tim koordinasi. Tahapan pelaksanaan Program PMB-RW dimulai dari tahap persiapan.

2. Tahapan Sosialisasi

Setelah tim koordinasi tingkat kota sampai tingkat Kecamatan melakukan persiapan selanjutnya dilaksanakan sosialisasi. Sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan kepada pelaksana di lapangan dan juga masyarakat mengenai tujuan dan juga cara kerja program PMB-RW. Sosialisasi tingkat Kota langsung disampaikan oleh bapak Walikota Pekanbaru H Firdaus ST,MT mengenai program PMB-RW.

3. Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

Setelah melaksanakan sosialisasi di Kecamatan yang merupakan tahapan dari program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW), selanjutnya yaitu tahapan perencanaan. Untuk tahun anggaran 2015 perencanaan disusun oleh koordinator tingkat Kecamatan yang berkoordinasi dengan Lurah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis. Perencanaan belum melibatkan masyarakat secara langsung dikarenakan kegiatan dari program masih berupa pemberian pelatihan.

Pelatihan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan diikuti oleh masyarakat. Sebelum pelatihan terlebih dahulu Lurah dan tim di Kelurahan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

4. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Dimulai dengan tahapan persiapan kemudian dilanjutkan dengan tahapan perencanaan dan sosialisasi serta sampai pada tahapan pelaksanaan program, tahapan terakhir dari program adalah monitoring dan evaluasi. Kesuksesan sebuah program dapat dilihat pada tahapan monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim Koordinator tingkat Kecamatan yang kemudian disampaikan kepada koordinator tingkat Kota Pekanbaru. Untuk tahun 2015 ini dalam tahapan monitoring dan evaluasi belum melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, dikarenakan belum adanya pemberian dana kepada masyarakat untuk menjalankan program.

Untuk mencapai sasaran dari Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dalam pelaksanaannya harus langsung melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga program yang dilaksanakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat mencapai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat khususnya perempuan dapat dilihat pada tahapan-tahapan pelaksanaan PMB-RW Kota Pekanbaru.

B. Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) merupakan program yang mana pelaksanaannya langsung melibatkan partisipasi masyarakat.

Sehingga program yang dilaksanakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat mencapai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam Eko (2004:242) Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek :

1. Suara (*Voice*)

Partisipasi perempuan sudah terlihat dari tahapan awal program yaitu pada tahapan persiapan. Dengan berkoordinasinya Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) maka perempuan sudah ikut sertakan peran perempuan dalam penyusunan dan melakukan kajian terhadap kebijakan yang tertuang dalam peraturan PMB-RW.

2. Akses (*Access*)

Akses akan menjadi arena titik temu antara warga dan pemerintah. Pemerintah wajib membuka ruang akses warga dan memberikan layanan publik pada warga, terutama kelompok-kelompok marginal. Sebaliknya warga secara bersama-sama proaktif mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensinya maupun merumuskan gagasan pemecahan masalah dan pengembangan potensi secara sistematis.

Pada program PMB-RW masyarakat khususnya perempuan lebih memiliki ruang dalam memperoleh akses. Dilihat dari pelatihan yang dilaksanakan yang lebih melibatkan partisipasi perempuan. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain : pelatihan tata boga, menjahit lanjutan dan pelatihan rebana.

3. Pengawasan (*Control*)

Setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah. Sekarang masyarakat terlibat aktif baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan dari kebijakan pemerintah. Menurut **M. Abduh dan Tuti Khairani Harahap (2014)** dalam jurnal *Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Partisipasi Publik* yaitu menurut Waterson dalam Conyers (1994) pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Masyarakat diikuti sertakan pada setiap proses kebijakan terutama kebijakan pembangunan.

Masyarakat diikuti sertakan pada setiap proses kebijakan terutama kebijakan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan dan pemerintahan Kelurahan, partisipasi masyarakat terbentang dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi. Proses ini tidak semata didominasi oleh elite-elite (pamong desa, pengurus RT maupun pemuka masyarakat), melainkan juga melibatkan unsur-unsur lain seperti perempuan, pemuda, kaum tani, buruh dan sebagainya.

Di Kelurahan Tuah Karya, Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) masih tahap awal yaitu berupa pemberian pelatihan. Belum ada pemberian dana setiap RW yang seharusnya menjadi tujuan program. Dana yang tersebut akan diberikan pada setiap RW yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur

ataupun koperasi dan usaha ekonomi kreatif di lingkungan RW. Setiap RW akan didampingi oleh sarjana pendamping yang sudah ditetapkan pada perencanaan.

Untuk pengawasan terhadap program PMB-RW ini masyarakat masih menyerahkan kepada ketua RW dan sarjana pendamping RW yang dijabat oleh seorang perempuan untuk di Kelurahan Tuah Karya. Masyarakat tidak mengetahui kapan program utama akan dilaksanakan, kapan mereka bisa mempraktekan pelatihan yang mereka terima dari Kelurahan. Mereka tidak bisa menjalankan program tanpa dana yang telah dijanjikan pemerintah. Masyarakat hanya dapat mengawasi dengan cara mengikuti pertemuan di RW. Mereka dapat memantau sejauh mana pelaksanaan program PMB-RW.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Program PMB-RW di Kelurahan Tuah Karya

Sebagaimana diketahui bahwa program PMB-RW tahun anggaran 2015 sampai pada tahap pemberian pelatihan. Namun, partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk pencapaian tujuan yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan program PMB-RW di Kelurahan Tuah Karya merupakan cermin dari keberhasilan program PMB-RW di Kota Pekanbaru.

Apabila program tersebut dilaksanakan di wilayah Kelurahan, maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat Kelurahanlah yang

menjadi kunci keberhasilannya, khususnya partisipasi perempuan. Namun demikian peran serta perempuan dalam proses pelaksanaan program memiliki banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pelaksanaan program, menurut penulis faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam program PMB-RW di Kelurahan Tuah Karya adalah faktor intern yang meliputi kesadaran, penghasilan / pendapatan. Sedangkan faktor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan / fasilitas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan sampai pada pemberian pelatihan kepada masyarakat yang didominasi bagi perempuan.
2. Dalam program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Tuah Karya perempuan sudah berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pelatihan. Tetapi masyarakat baru dilibatkan dalam pelaksanaan pelatihan.
3. Pelatihan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sudah melibatkan partisipasi perempuan. pelatihan yang dilaksanakan antara lain : pelatihan menjahit lanjutan, rebana, dan pelatihan tata boga. Namun jumlah perempuan

yang mengikuti pelatihan belum mewakili keterwakilan perempuan.

4. Faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam program PMB-RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari faktor intern yang meliputi : faktor kemauan dan faktor pekerjaan. Faktor eksetern yang mempengaruhi partisipasi perempuan meliputi : faktor peralatan dan juga faktor kepemimpinan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Kota Pekanbaru agar segera memberikan dana kepada setiap Rw pelaksana program sehingga program dapat segera dilaksanakan dan mencapai tujuan program.
2. Melihat dari jumlah peserta perempuan pada pelatihan yang dilaksanakan masih kurang mewakili keterwakilan jumlah perempuan. Sebaiknya untuk pelaksanaan pelatihan anggaran tahun selanjutnya pemerintah menambahkan jumlah peserta perempuan agar ketika pelaksanaan program PMB-RW lebih efektif dan dapat mencapai tujuan.
3. Adanya keberlanjutan program PMB-RW ini dan tidak hanya sampai pada tahap pelatihan tetapi sampai kepada seluruh Rw yang menjadi sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Aziz, Moh. Ali dkk. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : PT. LkiS Pelangi Nusantara.
- Darwin, Muhadjir. (2005). *Negara dan Perempuan*. Yogyakarta : Graha Guru dan Media Wacana.
- Eko, Sutoro. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta : IRE Press.
- _____.(2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : APMD Press.
- Hidayat, Syarif. (2000). *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*. Jakarta : Pustaka Quantum.
- Isbandi, Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok : FISIP UI Press.
- Juliantara, Dadang. (2002). *Pembaruan Desa*. Yogyakarta : Laperia Pustaka Utama.
- Khairudin. (2000). *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi, Perencanaan*. Yogyakarta : Liberty.
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Mardikanto, Totok. dan Poerwoko Soebiato. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R Khairul. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia.
- _____.(2009). *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya : ITS Press.
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Galia Indonesia : Bogor.
- Ndraha, Taliziduhu. (2007). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Karya Darma.
- Slamet, Margono. (2002). *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*, Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Universitas Indonesia. (2007). *Hak Azasi Perempuan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Usman, Sunyoto. (2003). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Widodo, Triputro R dan Supardal. (2005). *Pembaharuan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : APMD Press.
- Zulganef. (2008). *Metode Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Perundang-undangan**
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kota/Kabupaten.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penetapan Hari Jadi Pekanbaru tanggal 26 Desember 2005 .
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan tanggal 22 Agustus 2006.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Periode 2012-2017.
- Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2015 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).
- Sumber lain :**
- Herwina Tarigan dkk. (2011). Partisipasi Perempuan dan Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender. Volume 7 No. 2. Diakses pada 07 Januari 2016.
- Anggita Permana Putri. (2011). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Partisipatif. <https://digilib.uns.ac.id/Partisipasi-perempuan-dalam-perencanaan-pembangunan>. Diakses pada 13 Oktober 2015.
- Simon, Riyadi. (2011). Gender Mainstreaming dan Pendekatan Efisiensi Wanita Dalam Pembangunan. <http://www.academia.edu/8995092/Pengarusutamaan-Gender-Gender-Mainstreaming>. Diakses pada 17 Desember 2015.
- Abduh, M & Tuti Khairani Harahap. "Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Partisipasi Publik". *Elsevier Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211 (2014). 945-952, Elsevier UK